

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Ananda, Indrawadi Junaidi. *Hubungan Internasional: Konsep dan Teori*. Padang: UNP Press, 2008.
- Ardinto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Public Reation Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Bawono Kumoro, Aay Muh Furkon dkk. *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi Terhadap Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: The Habibie Center, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2005.
- Busroh, Abu Daud. *Cipta Selektia Hukum Tata Negara*. Palembang: Rineka Cipta, 1993.
- Gunawan, Markus. *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD*. Jakarta: visi media, 2008.
- Hafni Syahrir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut Undang-Undang 1945*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Jimmy P, M. Marwan. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Education)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bina Cipta, 2010.
- Narwoko, Dwi, Suyanto Bagong. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).

- M. Djadijono, T. A. Legowo. *Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia: Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: FORMAPPI, 2005.
- Manan, Bagir. *DPD, DPR, dan MPR Dalam Undang-Undang 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jambi: Rineka Cipta, 1993.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, 2000.
- Silalahi, Ulber. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budhaya, 1999.
- Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Tt.
- Sudarman, Momon. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*. Malang: UMM Pres, 2002.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Thaib, Dahlan. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Widodo, Wahyu, H. Gunarto & H. Djauhari. *Politik Hukum*. Semarang: Perpustakaan Nasional 2016.
- Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Yusnawan, Lubis. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2015.

B. Skripsi dan Jurnal

- Abdu Rahmat Rosyadi, Aditya Rahmadhony, “Peraturan MPR, DPR, dan DPD: Internal Regulation atau Perundang-Undangan,” *Legislasi Indonesia* 19:4 (Desember 2022): 437, 446.
- Barlian, Iyan, “Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat secara Konstitusionalitas dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi”, *Ilmu Hukum* 3:2 (Juli 2023) 414.
- Ditayani Antari, Putu Eva, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* 4:2 (April 2020): 229.
- Dwi Saputra, Wahyu. “Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak Di Panti Asuhanan Mahmudah Di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.” *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2016.
- Humiati, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Kebijakan Pemerintah tentang pengangkatan Duta Besar setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Ilmu Hukum* 4:2 (September 2022): 226-227.
- Hutomo Sugiarto, Anton, “Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2:1 (Desember 2018): 166.
- Ibrahim, Mariana, “Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Tahqiqi* 15:1 (2021): 11-12.
- Mawardi, M. Arsyad, “Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum* 15 (Januari 2008): 61.
- Pranata Kusuma, Diki, “Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi DPR RI Berdasarkan Peranan Perundang-Undangan”, *Al-Ashlahah: Journal Of Islamic Studies* 1:1 (Februari, 2017): 7-8.
- Restu Hirmawan, Hary. “Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Duta Besar Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015: 6.

- Rochmawanto, Munif, "Pembagian Kekuasaan Antara MPR, DPR, dan DPD dalam Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan yang Berkedaulatan Rakyat", *Jurnal Independent 1* (2014): 2.
- Ruhenda, "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia", *Journal Of Governance and Social Policy 1:2* (Desember 2020) 65-67.
- Sakti, Lanang. "Implikasi Yuridis Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta dan Konsul Oleh Presiden", *Jurnal Fundamental Justice 3:1* (Maret 2022), 54.
- S. Attamimi, A. Hamid. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana UI Jakarta, 1990.
- Sunardi, "Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Meta Yuridis 1* (2018), 28.
- Sunarto, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Intergealistik* (2017): 57.
- Suroto, "Presiden dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 Setelah perubahan", *Spektrum Hukum 14:2* (Oktober 2017) 248.
- Yuhdi, Mohammad. "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945", *Maksigama Jurnal Hukum 1* (Mei 2016) 21-32.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Kepegawaian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pendidikan (Pasal 12 dan 13) UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UUD NRI tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.
- Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tata Tertib

D. Majalah dan Buletin

Faisal, Mohammad, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia,” *Adalah Hukum dan Keadilan* 1 (2017): 79.

E. Website

Abdhuil Azis, Yusuf “Kerangka Pemikiran: Contoh dan cara membuat,” <https://deepublishstore.com/blog/kerangka/pemikiran/> (diakses tanggal 13 Mei 2023).

Adlani, Nabil “3 Konsep Hubungan Internasional,” <https://adjar.grid.id/read/543650110/3-konsep-hubungan-internasional?page=all> (diakses tanggal 11 Januari 2023).

Ardiani, Femi “Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia,” <https://www.portal-ilmu.com/2016/12/kedudukan-perwakilan-diplomatik-indonesia.html> (diakses tanggal 28 Mei 2024).

Ha, Nguyen, “Hubungan Persahabatan Vietnam dan Indonesia: Semua Prestasi Kerja Sama Berdasarkan Pada Hubungan Persahabatan Yang Baik,” <https://vovworld.vn/id-ID/hubungan-persahabatan-vietnamindonesia/vietnamindonesia-semua-prestasi-kerja-sama-berdasarkan-pada-hubungan-persahabatan-yang-baik-1260179.vov> (diakses tanggal 31 Desember 2023).

Kantor Berita Politik Republik Merdeka, “Profil DPR RI,” <https://rmol.id/dpr/page/profil.php> (diakses tanggal 2 Juni 2024).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Tentang Duta Besar.” <http://www.kemlu.go.id/> (diakses 28 Mei 2024).

Kementerian Luar Negeri, “Duta Besar Andy Rachmianto Terima Bintang Persahabatan dari Presiden Palestina,” <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4099/berita/Duta%20Besar%20Andy%20Rachmianto%20Terima%20C3%A2%E2%82%AC%C5%93Bintang%20Persahabatan%20C3%A2%E2%82%AC%20dari%20Presiden%20Palestina> (diakses tanggal 25 Oktober 2022).

Nurkhalisa, Deanita, “Duta Besar Untuk Equador Ceritakan Kerjasama Indonesia-Ecuador Kepada Mahasiswa HI UNAIR,” <https://unair.ac.id/duta-besar-ri-untuk-ekuator-ceritakan-kerja-sama-indonesia-ekuator-kepada-mahasiswa-hi-unair/> (diakses tanggal 02 Juni 2022).

Sekretariat Jendral DPR RI, “Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Republik Indonesia,” <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban> (diakses tanggal 28 Mei 2024).

Sekretariat Jendral DPR RI, “Tentang DPR: Hak dan Kewajiban Anggota DPR,” <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban> (diakses tanggal 28 Mei 2024).

